



## **Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Tulungagung Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

**Yarfika Halawa**

*yarfika.23187120011@ubhi.ac.id*

Universitas Bhinneka PGRI

**Sulastri Rini Rindrayani**

*sulastriskippgrita@gmail.com*

Universitas Bhinneka PGRI

Alamat: Tulungagung, Jawa Timur

Korespondensi penulis: *yarfika.23187120011@ubhi.ac.id*

**Abstract.** *Poverty is a very serious problem that must be addressed immediately, which plays an important role in alleviating poverty is the government and also the community itself. The purpose of this research is to find out how efforts to empower MSMEs in Tulungagung to reduce poverty levels. The method used by the author in this research is Study Literature Review or systematic literature review. The Study Literature Review method is a research and development method used to collect and evaluate research on a particular topic. The efforts made by the government are to increase access to capital, provide training and assistance to the community and improve infrastructure and facilities for opening a business, so as to increase competitiveness among entrepreneurs in Tulungagung Regency and make it easier for MSME entrepreneurs to open a business.*

**Keywords:** *Poverty, Empowerment, MSMEs, Tulungagung.*

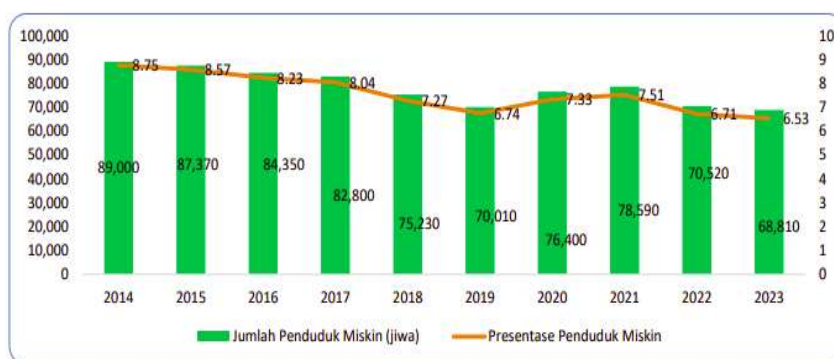
**Abstrak.** Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius yang harus segera ditangani, yang berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan adalah pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan UMKM di Tulungagung untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Study Literature Review atau tinjauan pustaka sistematis. Metode Study Literature Review merupakan metode penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian pada topik tertentu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan akses modal, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan meningkatkan infrastruktur serta sarana untuk membuka usaha, sehingga dapat meningkatkan daya saing di antara pengusaha yang ada di kabupaten Tulungagung dan memudahkan para pengusaha UMKM untuk membuka suatu usaha.

**Kata Kunci:** *Kemiskinan, Pemberdayaan, UMKM, Tulungagung*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan (Aprila et al, 2023). Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh (Andriani, 2023). Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru (Vita Ferezagia, 2018). Demikian juga halnya dengan Kabupaten Tulungagung, menurut *Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Tulungagung Profil Kemiskinan 2023, n.d.)* Kabupaten Tulungagung jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2023 mencapai 68,81 ribu jiwa, mengalami penurunan 1,71 ribu jiwa terhadap bulan Maret 2022 yang sebesar 70,52 ribu jiwa. Persentase

Penduduk Miskin pada bulan Maret 2023 di Kabupaten Tulungagung sebesar 6,53 persen, sedangkan pada bulan Maret 2022 sebesar 6,71 persen, mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa masalah kemiskinan di Tulungagung masih merupakan masalah serius ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Tulungagung salah satunya adalah dengan program UMKM. Menurut Supriyanto (Supriyanto, 2012) Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Berikut ini adalah data penduduk miskin di kabupaten Tulungagung dari tahun 2014 sampai tahun 2023 (*BPS Kabupaten Tulungagung Profil Kemiskinan 2023*, n.d.)



**Gambar 1. Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung**  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung

Berdasarkan gambar 1, jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 adalah sebesar 6.53 % atau sekitar 68.810 jiwa. Salah satu faktor yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah dengan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Menurut Anugerah dan Nuraini (Anugerah & Nuraini, 2021) terdapat beberapa cara untuk menekan angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan kualitas SDM berupa sekolah gratis atau pemberian skill yang mampu diterapkan guna menunjang kehidupannya. Selain itu kemiskinan juga dapat ditekan dengan perluasan lapangan pekerjaan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) salah satunya yang mampu menyerap lapangan kerja yang cukup besar. Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah;

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang per-orangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria tertentu.

- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. (Hamza & Agustien, 2019)

UMKM memiliki peranan sebagai sektor ekonomi rakyat yang berkaitan langsung dengan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya UMKM diharapkan dapat mendorong perkembangan disektor lainnya. Jumlah UMKM yang meningkat dapat membuka peluang kerja yang lebih luas sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan akan mendorong daya beli masyarakat dengan begitu perekonomian daerah akan ikut meningkat. Jadi, jumlah UMKM yang semakin banyak akan menyerap tenaga kerja yang semakin besar dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan begitu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin berkurang. (Anugerah & Nuraini, 2021) Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung untuk mengentaskan masalah kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Study Literature Review atau tinjauan pustaka sistematis. Metode Study Literature Review merupakan metode penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian pada topik tertentu. Tujuan peneliti menggunakan metode ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan topik penelitian yang relevan. (Milenia Ariyati et al., 2021) Dengan menggunakan Study Literature Review dalam penelitian ini, peneliti akan mendapatkan informasi mengenai upaya penanggulangan masalah kemiskinan yang bisa di terapkan di Kabupaten Tulungagung melalui pemberdayaan UMKM.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung.

### **a. Peningkatan Akses Modal**

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh peranannya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2015). UMKM memiliki potensi yang begitu besar namun kenyataannya UMKM masih mengalami masalah yang hingga kini masih menjadi kendala adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. (Hamza & Agustien, 2019)

Pemerintah telah banyak mengupayakan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan memberikan modal usaha bagi para masyarakat yang ingin memiliki usaha sendiri. Memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal melalui lembaga keuangan mikro, program pembiayaan, dan kredit usaha rakyat. Pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, Ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Program pangan dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan

rendah (*lower income*), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut. (Supriyanto, 2012) Untuk mengatasi masalah keterbatasan modal, saat ini juga telah hadir Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. (Supriyanto, 2012) Salah satu faktor penting yang dapat menentukan berjalannya suatu usaha adalah modal usaha. Ketika seorang wirausahawan sudah memiliki karakter yang kuat dalam menentukan konsep usaha, maka ia akan menentukan langkah selanjutnya yaitu dengan penentuan sumber dana yang akan ia gunakan dalam berwirausaha. Modal usaha adalah hal yang sangat diperlukan dan harus tersedia dalam menjalankan sebuah usaha. Modal merupakan faktor pendukung yang sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha, karena dengan modal dapat mempengaruhi karakteristik wirausaha. (Huri Mustofa *et al.*, 2021) upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan, seperti pelatihan dan pendampingan, peningkatan akses modal, pengembangan jaringan pemasaran, dukungan kebijakan pemerintah, dan pengembangan inovasi produk (Bella Yuniar Putri DwiKartini *et al.*, 2024) Ketika seorang pelaku usaha sudah memiliki karakter yang kuat dalam menjalankan usaha dan memiliki modal atau sumber dana yang akan ia gunakan dalam menjalankan usaha, maka langkah selanjutnya yaitu penentuan strategi yang akan ia gunakan untuk memasarkan produknya. Sebuah produk dapat dikenal oleh banyak orang apabila produk tersebut diperkenalkan kepada masyarakat. Perkenalan suatu produk harus dibuat dan dilaksanakan dengan rencana (strategi) yang matang. Pemasaran sendiri adalah aktivitas untuk memperkenalkan suatu produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen lalu mengembangkan kebutuhan tersebut menjadi sebuah produk yang mampu di pasarkan dan diperjualbelikan sehingga perekonomian pun semakin meningkat. (Huri Mustofa *et al.*, 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM adalah dengan meningkatkan akses modal kepada calon pengusaha UMKM, sehingga usaha yang akan dikerjakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dengan modal yang cukup tanpa takut akan kekurangan modal awal untuk memulai sebuah bisnis atau usaha sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung.

#### **b. Pelatihan dan Pendampingan**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan program pelatihan, seperti pelatihan kue basah dan kering di Tanggunggunung, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha UMKM. Menurut Rektor Universitas Paramadina Didik J. Lakhbini, ada tiga hal yang mendorong sebuah bisnis yang membina pengusaha kecil dan menengah yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten yakni pertama memodernisasi perusahaan terlebih dahulu termasuk persiapan personil. Kedua, Stabilisasi pengelolaan. Masalah manajemen usaha kecil dan menengah menjadi permasalahan, karena banyak pengusaha tidak memiliki karyawan yang berkualitas dan termasuk keterbatasan teknis. Ketiga, Modernisasi alat penunjang proses produksi, termasuk instrumen keuangan terkini. Keberhasilan UKM yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam tata kelola perusahaan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca dan catatan keuangan. UMKM dapat menggunakan laporan keuangan untuk mendorong pengembangan usaha dan mendapatkan tambahan modal kerja.

Dalam mengembangkan suatu usaha, maka pelatihan dan pendampingan dari pemerintah sangatlah diperlukan. Tanpa pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha pemula maka akan sangat sulit untuk bisa berkembang karena masih meraba-raba dan belum ada pengalaman di dunia bisnis. Secara khusus di era digital saat ini, sangatlah penting bagi masyarakat untuk di edukasi dalam melakukan persaingan supaya usaha dan bisnis terus mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan UMKM menyatakan permasalahan internal usaha mikro kecil dan menengah; rendahnya profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola, keterbatasan permodalan dan akses terhadap perbankan dan pasar, kemampuan penguasaan teknologi yang rendah, sedangkan permasalahan eksternal; iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, kebijakan pemerintah yang belum memihak bagi pengembangan usaha kecil, kurangnya pembinaan manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Solikhah & Wahyudin, *n.d.*) salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pendampingan masyarakat adalah dengan mewujudkan literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan salah satu fokus pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah berpandangan bahwa melalui literasi keuangan maka stabilitas sistem keuangan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan secara inklusif dapat lebih mudah tercapai. Hal inilah yang kemudian mendorong Pemerintah Republik Indonesia membentuk Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sejak tahun 2013 (Tangga, 2020). Terdapat sekitar 21,8% masyarakat yang benar-benar paham mengenai literasi keuangan. (Milenia Ariyati *et al.*, 2021).

Upaya strategis dalam meningkatkan keberlangsungan UMKM, tindakan yang dapat dilakukan melalui wawasan atau pengetahuan keuangan, sehingga pengelolaannya dapat dipergunakan sebagai alat untuk berkembang lebih baik dan bersaing dengan usaha menengah besar. Melalui konsep inovasi yang berkelanjutan serta pengetahuan dalam mengelola keuangan akan membuat para pelaku UMKM menjadi lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan usahanya. Dengan literasi keuangan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, kebutuhan individu dan produk keuangan, individu harus memiliki literasi keuangan untuk mengatur keuangan pribadinya (Milenia Ariyati *et al.*, 2021)

Pada gambar 2, menjelaskan tentang pendaftaran perusahaan menurut kecamatan dan bentuk usahanya di kabupaten Tulungagung pada tahun 2022. Sekitar 8.809 usaha yang tercatat di kabupaten Tulungagung, akan tetapi jika di bandingkan dengan jumlah populasi penduduknya, maka jumlah tersebut sangatlah sedikit. Ada banyak usaha yang didirikan tanpa ijin atau tanpa pendampingan langsung dari pemerintah, sehingga hal ini mengakibatkan para pengusaha kecil tidak mendapatkan bantuan modal usaha, pelatihan dan pendampingan dari pemerintah.

**Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Tulungagung Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Kecamatan	PT	Koperasi	CV	Firma	Perorangan	Badan Usaha Lain	Jumlah
Besuki	2	2	4	-	291	10	309
Bandung	6	2	6	1	499	8	522
Pakel	3	1	4	1	287	4	300
Campurdarat	8	1	2	-	392	3	406
Tanggunggunung	3	2	-	1	152	8	166
Kalidawir	2	2	9	-	386	-	399
Pucanglaban	2	-	1	-	142	1	146
Rejotangan	14	2	9	-	473	4	502
Ngunut	24	4	13	-	761	6	808
Sumbergempol	13	1	6	-	760	12	792
Boyolangu	20	2	16	2	728	6	774
Tulungagung	36	13	44	2	858	16	969
Kedungwaru	29	5	29	3	791	8	865
Ngantru	14	1	8	-	381	4	408
Karangrejo	11	2	9	-	267	8	297
Kauman	9	1	13	-	318	6	347
Gondang	6	2	14	-	389	9	420
Pagerwojo	4	-	3	-	176	2	185
Sendang	2	9	2	-	178	3	194
Tulungagung	208	52	192	10	8 229	118	8 809

**Gambar 2. Pendaftaran Perusahaan Menurut Kecamatan dan Bentuk Usaha**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung, Dinas Penanaman Modal

Jadi dapat disimpulkan bahwa, peran masyarakat dalam membantu pemerintah untuk memajukan usaha dan bisnis adalah dengan taat kepada peraturan yang tersedia, melakukan ijin atas usaha yang ada sehingga pemerintah juga akan memberikan fasilitas, modal, pelatihan kepada pengusaha kecil, hingga menengah untuk meningkatkan daya saing yang tinggi serta pendapatan atau penghasilan.

**c. Pengembangan Sarana Perdagangan dan Infrastruktur**

Meningkatkan akses infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih untuk mendukung keberlangsungan usaha UMKM sangatlah penting, selain itu juga sarana prasarana atau tempat untuk usaha merupakan hal yang paling utama dalam melakukan semua usaha. Pada gambar di bawah ini menguraikan tentang sarana perdagangan di tersedia dan tercatat di Kabupaten Tulungagung. Jumlah keseluruhan sebanyak 2.143 pada tahun 2022 turun drastis dari tahun 2020 dan 2021, hal ini sangat terjadi karena banyak pengusaha yang melakukan penjualan secara online daripada menjual di pasar, toko ataupun kios/warung.

Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Tulungagung		
	2020	2021	2022
Pasar	32	32	31
Toko	110	156	175
Kios	4 227	4 227	1 937
Warung	-	-	-
Jumlah	4 369	4 415	2 143

**Gambar 3. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Tulungagung**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung

Untuk infrastruktur, berdasarkan dokumen Tataran Transportasi Perkotaan (2015), Kabupaten Tulungagung dilayani oleh 2 moda transportasi yaitu jalan dan kereta api. Sarana jalan menuju tempat-tempat penting dan daerah tujuan utama hampir seluruhnya diperkeras aspal, yakni 95% dengan perkerasan aspal dan 5% dengan perkerasan kerikil dan makadam (Mustaniroh et al., 2019). Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan infrastruktur seperti jalan, air dan listrik dan sarana sebagai tempat untuk mendirikan sebuah usaha.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui pengolahan data yang telah tersedia sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa melalui pemberdayaan UMKM dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena semakin banyak usaha-usaha yang berkembang, maka tingkat pengangguran akan semakin kecil. Adapun upaya yang dilakukan dalam memberdayakan UMKM di Tulungagung adalah dengan meningkatkan akses modal, pemerintah menyediakan dan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kepada calon pengusaha awam serta peningkatan infrastruktur dan sarana usaha yang memadai, dengan melakukan upaya-upaya tersebut, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung akan semakin kecil dan sebaliknya, tingkat kesejahteraan penduduk akan semakin meningkat karena lapangan pekerjaan yang semakin luas.

Saran untuk pelaku (pengusaha) UMKM agar tetap membangun hubungan yang baik dengan pemerintah, mengikuti setiap peraturan terkait proses perizinan suatu usaha dan saran untuk pemerintah kabupaten Tulungagung supaya terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan daya saing di era digital dan globalisasi yang semakin maju.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, W. (2023). Comprehensive Budget Model as a Business Planning Tool. *International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship (IJGAME2)*, 4(1), 95–102. <https://doi.org/10.48024/ijgame2.v1i1.12>
- Anugerah, F. N., & Nuraini, I. (2021). PERAN UMKM DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. In *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* (Vol. 5, Issue 1).
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Bella Yuniar Putri DwiKartini, Ayuning Budiati, & Juliannes Cadith. (2024). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Cilegon. *Jurnal Niara*, 16(3), 542–551. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.17126>
- BPS Kabupaten Tulungagung Profil kemiskinan 2023. (n.d.).
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>

- Huri Mustofa, N., Afrilia, T., & Nur, A. (2021). JURNAL SKETSA BISNIS Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dengan Inovasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pelaku UMKM di Kabupaten Semarang). *Jurnal Sketsa Bisnis*, 08(02), 82–98. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index>
- Milenia Ariyati, I., Agustina, F., & Miliani, G. T. (2021). Systematic Literature Review PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM DI INDONESIA. In *Perbankan Syari'ah* (Vol. 10, Issue 1).
- Mustaniroh, S. A., Zakiyah, O., & Astuti, R. (2019). Strategi Pengembangan Kluster UKM Keripik Gadung di Kabupaten Tulungagung. *JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 5(2), 221. <https://doi.org/10.31289/jkbm.v5i2.2201>
- Solikhah, B., & Wahyudin, A. (n.d.). Pelatihan dan Pendampingan Menuju Peningkatan Usaha dan Kemandirian UMKM di Kelurahan Kalisegoro.
- Supriyanto, -. (2012). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.627>
- Vita Ferezagia, D. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. In *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* (Vol. 1, Issue 1).